

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam berbagai aspek pemerintahan setiap periodenya agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan terutama didalam bidang keuangan. Salah satu aspek pemerintahan yang selalu melakukan perbaikan setiap periodenya adalah aspek akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang yang selalu mengalami perubahan signifikan karena informasi keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat tersedia melalui proses akuntansi. Salah satu contoh dari perubahan yang terjadi pada akuntansi pemerintahan yaitu awalnya akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas lalu sekarang berubah menjadi basis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan menggunakan akuntansi basis akrual menyediakan informasi keuangan secara utuh dan realistis (Putri, 2016). Perubahan signifikan lainnya dapat terjadi didalam laporan keuangan yaitu salah satunya adalah aktivitas belanja seperti yang terjadi pada periode 2020 karena terjadinya bencana non alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19).

Pada masa pandemi prioritas lebih diarahkan terhadap kebutuhan kesehatan, bansos, dan juga pemulihan ekonomi. Belanja modal pun diperkirakan akan mengalami perlambatan pada masa ini dikarenakan hal tersebut. Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 6,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja realisasi belanja yang meningkat tersebut mengindikasikan komitmen pemerintah untuk melaksanakan percepatan belanja produktif serta meningkatkan pelayanan, termasuk juga melindungi masyarakat miskin dan rentan (Puspasari, 2020). Setiap jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah nantinya akan dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan secara transparan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Lebih Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran. Perlambatan atau peningkatan kinerja realisasi anggaran akan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran, selain itu Laporan Realisasi Anggaran juga dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu daerah/pusat. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang lebih dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan arus kas atau laporan neraca yang mana menandakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran memiliki prioritas yang lebih penting (Fajriyah, 2018). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang tersedia, pembaca laporan dapat melakukan analisis kinerja laporan keuangan seperti analisis pendapatan, analisis pembiayaan, dan analisis belanja.

Salah satu komponen penting yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah komponen belanja. Pada masa pandemi Covid-19 ini publik akan memberikan perhatian khusus terhadap komponen belanja karena masyarakat selaku pemberi dana melalui pajak-pajak yang telah mereka bayarkan ingin mengetahui apakah dana tersebut sudah digunakan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Melaksanakan pengawasan terhadap komponen belanja merupakan hal yang penting dikarenakan belanja adalah hal yang mudah dilakukan maka akan cukup mudah untuk terjadi kebocoran dan terjadinya inefisiensi (Ratnasari & Munawaroh, 2019). Segala bentuk evaluasi, koreksi, dan perbaikan untuk tahun berikutnya dapat dilakukan setelah anggaran belanja digunakan dan telah dilaporkan kedalam Laporan Realisasi Keuangan.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang wajib untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dituangkan kedalam Laporan Realisasi Anggaran secara transparan agar dapat diketahui apakah anggaran yang diberikan kepada DPD RI telah direalisasikan secara baik atau tidak. Selain untuk mengetahui realisasi anggaran yang dilakukan oleh DPD RI, Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja DPD RI sejauh mana dapat melakukan efisiensi anggaran dan menjauhi pemborosan.

Mengingat banyaknya masyarakat yang tertimpa kesulitan pada masa pandemic ini, maka diharapkan anggaran yang diberikan kepada DPD RI dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Sebab itu melakukan analisis terhadap kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran belanja. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi pada salah satu instansi pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi kinerja belanja Laporan Realisasi Anggaran DPD RI tahun anggaran 2017-2020.
2. Bagaimana kinerja belanja Laporan Realisasi Anggaran DPD RI tahun anggaran 2017-2020 dengan menggunakan rasio varians belanja, pertumbuhan belanja, dan keserasian belanja.

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah hanya terfokus pada analisis kinerja belanja LRA DPD RI periode 2017-2020. Penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, efisiensi dan efektivitas belanja.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja belanja Laporan Realisasi Anggaran DPD RI tahun anggaran 2017-2020.
2. Untuk mengetahui kinerja belanja Laporan Realisasi Anggaran DPD RI tahun anggaran 2017-2020 dengan menggunakan rasio varians belanja, pertumbuhan belanja, dan keserasian belanja.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi tentang analisis kinerja belanja pemerintah khususnya pada DPD RI serta menambah sumber pustaka yang ada.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan bahan masukan bagi DPD RI dalam menentukan kebijakan untuk perbaikan kinerja belanja. Selain manfaat untuk DPD RI, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada publik tentang anggaran dan realisasi belanja sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah.